

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- , 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- , 2016. *Tindak Pidana Pornografi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah, 1987. *Pornografi dalam Hukum Pidana*. Bina Mulia. Jakarta.
- , 2017. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis dan Amir Ilyas. 2021. *Hukum Acara Pidana*. Kencana Prenadamedia. Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Eddy O.S. Hiariej. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidano (Edisi Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi. 2014. *Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Moh. Eka Putra. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*. USU Press. Medan.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana (Edisi Pertama)*. Kencana. Jakarta.
- Mukti Arto. 2011. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta

- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- R. Abdoel Djamali. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.
- S.R. Sianturi. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Tjipta Lesma. 1995. *Pornografi dalam Media Massa*. Puspa Swara. Jakarta.
- Yanti Fitria. 2020. *Ekoliterasi dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi*. Deepublish. Yogyakarta.
- Yulies Tiena Masriani. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

JURNAL

- Ayya Sofia Istifarrah. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Video yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik". *Jurnal Jurist-Diction*. Volume 3. Nomor 4.
- Josef M. Monteiro. 2007. "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum Pro Justisia*. Volume 25. Nomor 2.
- Kukuh Prima, Usman, dan Liyus Herry. 2020. "Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia". *Journal of Criminal*. Volume 1. Nomor 3.
- Silvia Eka Fitania dan A.A. Ngurah Wirasila. 2017. "Analisis Yuridis Unsur Perbuatan dalam Tindak Pidana Kesusilaan". *Jurnal Kerta Wicara*. Volume 1. Nomor 1.
- Syarif Saddam Rivanie. 2016. "Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dokumen Elektronik Milik Orang Lain Di Kota Makassar (Studi Putusan No.69/Pid.B/2012/PN.Mks)". *Jurnal Hukum Volkgeist*. Volume 1. Nomor 1.
- Wahyu Sari Asih. 2021. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak". *Jurnal Verstek*. Volume 9. Nomor 2.

SKRIPSI

A. Iswan Randie Poetra. 2011. *Penerapan Asas Lex Systematische Specialiteit Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslaag Van Rechtsvervolging) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan Nomor : 345/Pid.B/2008/PN.Mks.)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Alyssa Khifdhiyani Jaya Putri. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan Video Pornografi di Aplikasi Media Sosial Facebook dan Twitter Studi Putusan Nomor: 215/Pid.B/2021 PN.Tgt*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Maiswa Nur Inayah. 2022. *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Mutmainnah. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Nomor 8 Tahun 1946).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

PUTUSAN

Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pwk. putusan.mahkamahagung.go.id. Diunduh pada tanggal 15 Januari 2023.

WEBSITE

Diva Lufiana Putri. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/26/093000265/apa-itu-juncto-?>. Diakses pada tanggal 2 April 2023 Pukul 21.27 WITA.

Karta Raharja Ucu. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/qiuobu282/lgbt-tak-lagi-persoalan-individu-tapi-semakin-terorganisasi>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2023 Pukul 21.07 WITA.

Kemdikbud. *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2023 Pukul 19.03 WITA.

Rita Damayanti. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI*. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8cd37-3-laporan-lgbt-lgb.pdf>. Diakses tanggal 26 Maret 2023 Pukul 21.20 WITA.